

BAB V

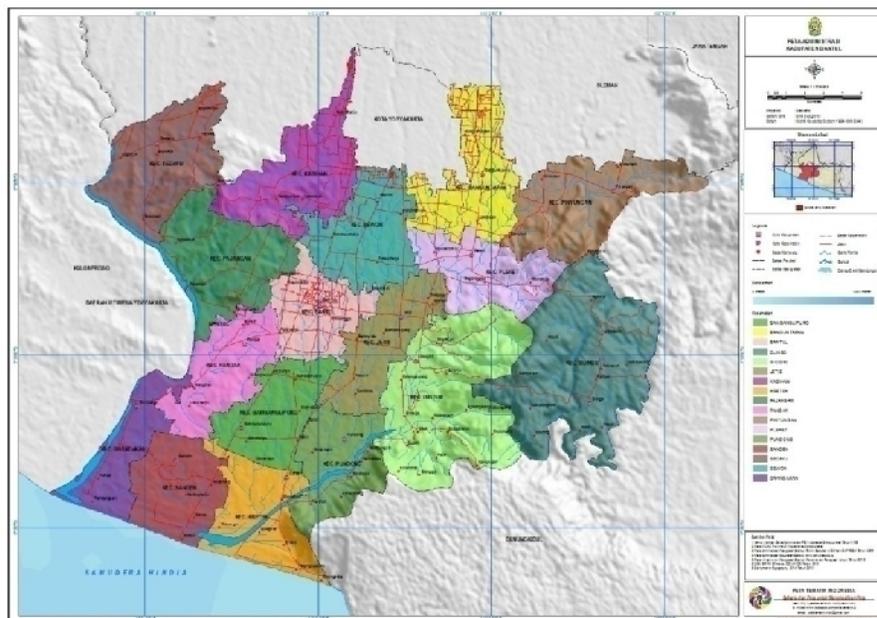
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

5.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten dibagian selatan dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas administrasi Sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Selatan Samudera Indonesia, sebelah timur Kabupaten Gunungkidul, sebelah barat Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 935 Dusun, 2.211 RW, 5.483 RT.

Gambar 5.1 Peta administrasi Kabupaten Bantul



Sumber : Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017

Kabupaten Bantul terletak pada posisi 110°12'34" - 110 31'08" BT dan 7° 44'04" - 8°00'27" LS seluas 50.685 Ha atau 506,85 Km². Dari 17 wilayah kecamatan, wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Dlingo seluas 5.587 Ha atau 11,02 % dan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan seluas 1.832 Ha atau 3,61 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Luas Wilayah Dan Bidang Tanah Di Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Jumlah		Jumlah	
		Bidang	%	M ²	%
1.	Kabupaten Bantul	566.541	100	506.850.000	100
2.	Tanah Terdaftar				
	▪ Hak Milik	475.002	83,84	291.754.101	57,45
	▪ Hak Guna Bangunan	18.281	3,23	7.058.492	1,39
	▪ Hak Pakai	3.192	0,56	8.722.607	1,72
	▪ Hak Lainnya (HPL, Sarusun)	11	0,002	2.433.413	0,48
	▪ Wakaf	1.461	0,26	355.459	0,07
	Jumlah	497.947	87,89	310.324.072	61,23
3.	Tanah Belum Terdaftar	68.594	12,11	196.525.928	38,77

Sumber : DPPKAD Kab. Bantul dan Kantor Pertanahan Kab. Bantul Tahun 2016

Berdasarkan data Buku Dalam Angka Kabupaten Bantul Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2015 tercatat 971.511 jiwa dengan presentase jumlah penduduk laki-laki 49,56 % dan penduduk perempuan 50,44 % dengan kepadatan penduduk 1.917 jiwa per Km². Dengan penyebaran jumlah tertinggi di Kecamatan Banguntapan sejumlah 4.771 jiwa per Km² dan jumlah

terendah di Kecamatan Dlingo sejumlah 653 jiwa per Km². Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 **Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Bantul**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.422	14.708	29.130
2.	Sanden	14.766	15.348	30.114
3.	Kretek	14.476	15.635	30.111
4.	Pundong	15.768	16.553	32.321
5.	Bambanglipuro	18.817	19.389	38.206
6.	Pandak	24.384	24.566	48.950
7.	Bantul	30.726	31.402	62.128
8.	Jetis	26.724	27.509	54.233
9.	Imogiri	28.672	29.410	58.082
10.	Dlingo	17.941	18.524	36.465
11.	Pleret	22.946	23.112	46.058
12.	Piyungan	26.350	27.072	53.422
13.	Banguntapan	68.068	67.820	135.888
14.	Sewon	56.506	55.998	112.504
15.	Kasih	60.713	61.610	122.323
16.	Pajangan	17.291	17.762	35.053
17.	Sedayu	22.940	23.583	46.523
Jumlah		481.510	490.001	971.511

Sumber : Buku Bantul Dalam Angka Tahun 2016

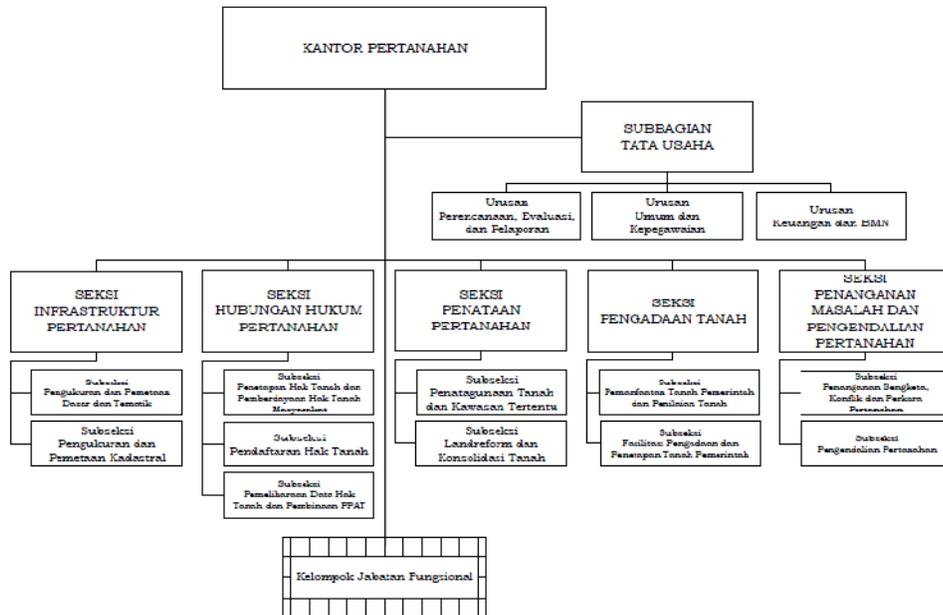
5.1.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di

Kabupaten Bantul yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Sesuai Peraturan Presiden RI No 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jo Peraturan Presiden RI No 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dalam Pasal 7 antara lain dinyatakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kota, jo Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 167/KEP-7.1/VI/2015 tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di wilayah kerja Kabupaten Bantul. Untuk lebih jelas mengenai susunan struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam bagan berikut :

Gambar 5.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2017

Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (a) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- (b) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- (c) Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- (d) Pelaksanaan penataan pertanahan;
- (e) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- (f) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- (g) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia per Juni 2017 sebanyak 113 orang, terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil dan 26 Pegawai Tidak Tetap. Rincian sumber daya kantor pertanahan Kabupaten Bantul berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 **SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenis Jabatan**

No.	Unit	Jenis Jabatan PNS				Non PNS
		Struktural (orang)	JFT (orang)	JFU (orang)	Jumlah (orang)	PTT (orang)
1.	Tata Usaha	4	-	12	16	2
2.	SPP	3	4	19	26	10
3.	HT&PT	5	-	23	28	10
4.	PPP	3	1	4	8	4
5.	PPM	3	-	2	5	
6.	SKP	3	-	1	4	
Jumlah		21	5	61	87	26

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah tersebut dapat dirinci dalam tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4 **SDM Kantor Pertanahan Kab. Bantul Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	Unit	Jenjang Pendidikan							Jumlah (orang)
		S2	S1/DIV	DIII	DI	SLTA	SLTP	SD	
1	Tata Usaha	1	7	2	1	7	-	-	18
2	SPP	2	16	5	3	6	3	1	36
3	HT&PT	-	24	3	-	7	3	-	37
4	PPP	-	8	-	-	5	-	-	13
5	PPM	1	4	-	-	-	-	-	5
6	SKP	2	1	-	-	1	-	-	4
Jumlah		6	60	10	4	26	6	1	113

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari segi pendidikan, Kantor pertanahan Kabupaten Bantul memiliki SDM yang mumpuni, hal ini dapat dilihat bahwa 80 orang dari 113 (70.8 %) berpendidikan lulusan perguruan tinggi, 26 orang (23%) berpendidikan SMA dan hanya 7 orang (6,2%) yang berpendidikan SLTP dan SD.

Dari jumlah SDM khusus Pegawai Negeri Sipil dapat dirinci berdasarkan golongan sebagaimana digambarkan dalam tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5 SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan Golongan PNS

No.	Unit	Golongan				Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	
1.	Tata Usaha	1	11	4	-	16
2.	SPP	1	22	3	-	26
3.	HT&PT	-	25	3	-	28
4.	PPP	-	8	-	-	8
5.	PPM	1	4	-	-	5
6.	SKP	1	3	-	-	4
Jumlah		4	73	10	0	87

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Jumlah Sumber daya manusia dari seluruh pegawai yang ada berdasarkan usia, dapat dirinci dalam tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6 **SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan Usia**

No.	Unit	Usia (tahun)				
		< 25	25-34	35-45	45-56	> 56
1.	Tata Usaha	-	6	4	7	1
2.	SPP	1	10	7	9	9
3.	HT&PT	-	9	7	21	1
4.	PPP	-	3	3	4	2
5.	PPM	-	2	-	3	-
6.	SKP	-	-	-	4	-
Jumlah		1	30	21	48	13

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Jumlah pegawai dengan kategori usia lanjut (>56 tahun), sesuai Undang-Undang No.4 tahun 1965 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berjumlah 13 orang (11,5 %). Saparinah (1983) berpendapat bahwa pada usia 55 sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap praenisiium pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh/kesehatan dan berbagai tekanan psikologis. Walaupun ada perbedaan 1 tahun dalam pengelompokan usia antara Undang-Undang No.4 tahun 1965 dengan Saparinah (1983), dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan usia > 56 tahun secara teori sudah tidak produktif untuk bekerja. Kondisi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ada 100 orang (85,5 %) pegawai dengan usia dibawah 56 tahun sehingga secara teori dapat dikatakan produktif dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.7 **SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Unit	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tata Usaha	10	8
2.	SPP	24	10
3.	HT&PT	18	22
4.	PPP	6	6
5.	PPM	2	3
6.	SKP	4	-
Jumlah		64	49

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Penelitian juga mengungkapkan proyeksi beberapa tahun ke depan terkait kondisi petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.8 **Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, kondisi s/d Tahun 2020**

No.	Tahun	Jumlah Petugas Ukur	Purna Tugas	Jumlah
1.	2015	20	-	20
2.	2016	20	4	16
3.	2017	16	4	12
4.	2018	12	3	9
5.	2019	9	1	8
6.	2020	8	0	8

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul s/d Juni 2017

Kondisi ini terjadi dengan catatan apabila belum ada penambahan penerimaan pegawai sampai dengan tahun 2020 (tahun prediksi).

5.2. Karakteristik Responden

Responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 responden yang dipilih secara acak. Setiap pegawai di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul memiliki peluang yang sama untuk dijadikan responden. Hal ini dikarenakan karena berdasarkan fakta empiris di lapangan, semua pegawai terlibat dalam pelaksanaan rencana strategis bidang pendaftaran tanah.

5.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

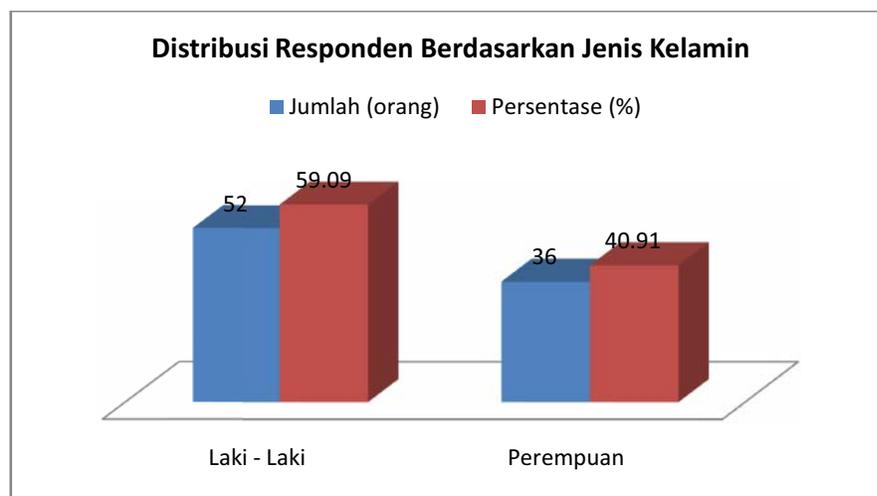
Berikut ini penulis sajikan kompilasi hasil pengolahan data primer penelitian terkait dengan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Hasil disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Tabel 5.9 **Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Nomor	Jenis Kelamin Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki - Laki	52	59.09
2	Perempuan	36	40.91
Jumlah		88	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Gambar 5.3 **Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan di atas diketahui jumlah responden berjenis kelamin laki laki lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin perempuan, yaitu 59.09 % berbanding 40.91 %. Hasil ini dapat diterima dikarenakan dengan teknik pengambilan sampel probability sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi, maka dengan mengadopsi teori matematika diketahui bahwa jumlah populasi yang lebih banyak akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih menjadi sampel. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki - laki di kantor pertanahan Kabupaten Bantul lebih banyak dari pada jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan, sehingga pegawai berjenis kelamin laki-laki memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih menjadi sampel dari pada pegawai berjenis kelamin perempuan.

5.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

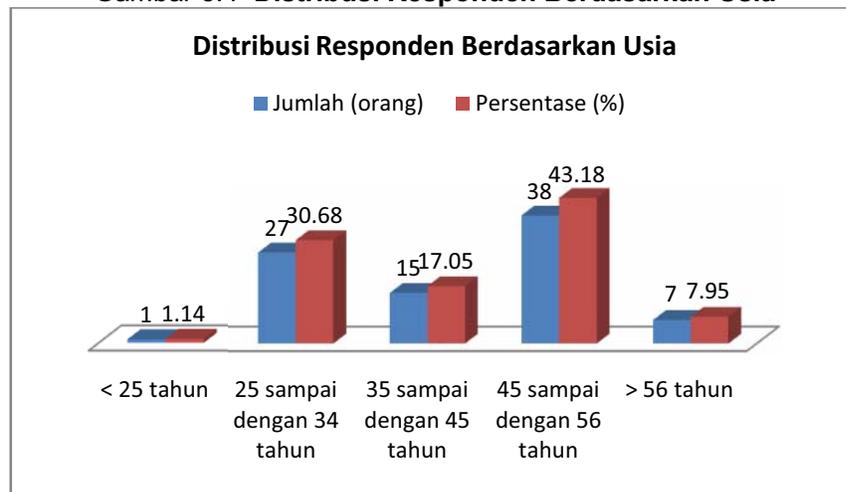
Selanjutnya distribusi responden berdasarkan usia disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.10 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Nomor	Usia Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	< 25 tahun	1	1.14
2	25 sampai dengan 34 tahun	27	30.68
3	35 sampai dengan 45 tahun	15	17.05
4	45 sampai dengan 56 tahun	38	43.18
5	> 56 tahun	7	7.95
Jumlah		88	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Gambar 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia



Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Persentase tertinggi dari distribusi responden berdasarkan usia berada pada umur 45 -56 tahun, lalu pada umur 25 – 34 tahun dan 35 - 45 tahun. Fakta ini berbanding lurus dengan data kepegawaian di kantor pertanahan Kabupaten Bantul yaitu bahwa jumlah terbanyak sumber daya manusia di kabupaten bantul berdasarkan penggolongan usia berada pada angka tersebut. Sebagian besar responden berada pada usia produktif yaitu 81 orang (92 %).

5.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

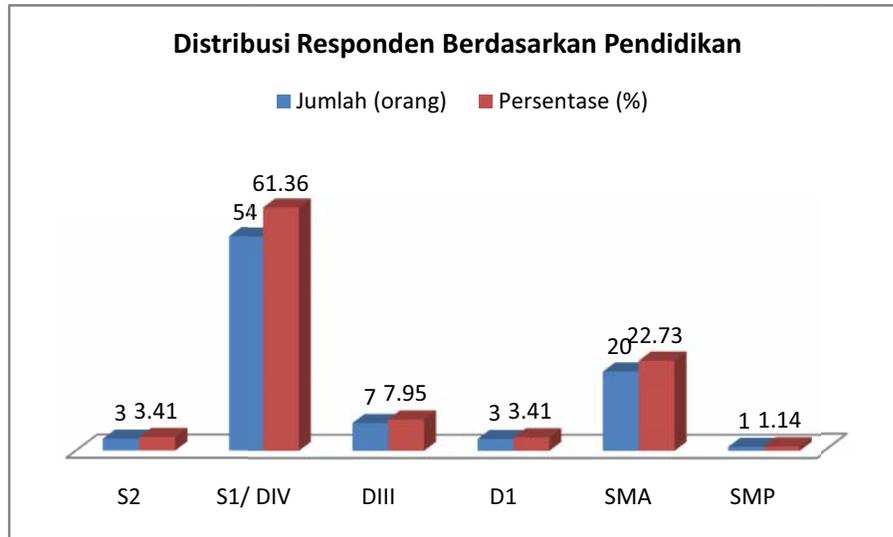
Adapun distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.11 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Nomor	Pendidikan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	S2	3	3.41
2	S1/ DIV	54	61.36
3	DIII	7	7.95
4	D1	3	3.41
5	SMA	20	22.73
6	SMP	1	1.14
Jumlah		88	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Gambar 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Apabila melihat tabel dan grafik di atas penulis berkeyakinan dengan apa yang responden isikan pada kuesioner akan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam kuesioner. Dengan jumlah persentase sebesar 61.36 % berpendidikan sarjana, 3.41 % berpendidikan S2, 3,41 berpendidikan Diploma 1 serta 22,73 % berpendidikan SMA maka dapat dikatakan mayoritas (98,86 %) responden memiliki kemampuan akademis yang tinggi. Sedangkan ada sebanyak 1.14 % atau sejumlah 1 orang responden yang berpendidikan SMP penulis berpendapat tidak akan menjadi kendala, karena fakta yang ada menunjukkan pegawai dengan pendidikan SMP tersebut memiliki umur di atas 56 tahun, sehingga telah kenyang pengalaman yang sangat membantu dalam pengisian kuesioner yang dibagikan.

5.2.4. Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

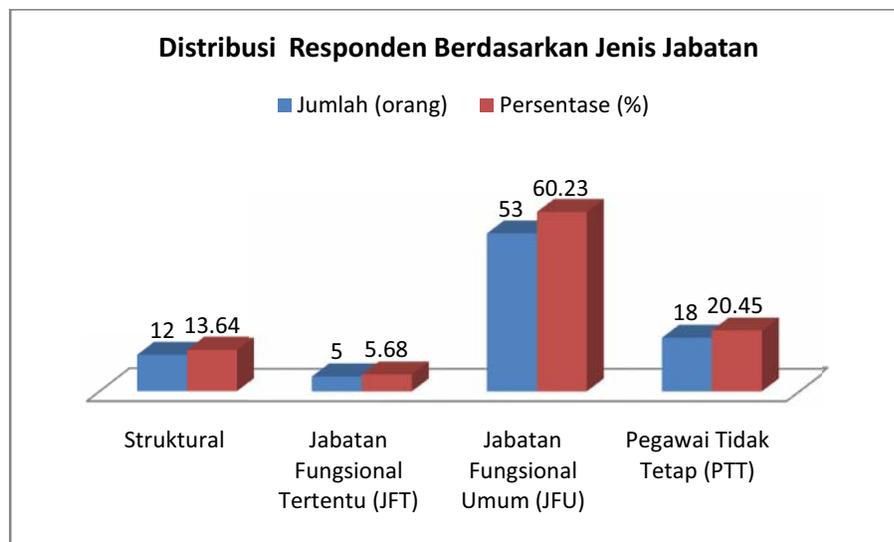
Distribusi responden yang diteliti apabila dilihat berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 5.12 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jenis Jabatan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Struktural	12	13.64
2	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	5	5.68
3	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	53	60.23
4	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	18	20.45
Jumlah		88	100

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Gambar 5.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan



Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa sebanyak 53 orang atau 60.23 % responden berasal dari jabatan fungsional umum, 18 orang atau 20.45 % pegawai tidak tetap, 12 orang atau 13.64 % dari pejabat struktural dan 5 orang atau 5.68 persen dari jabatan fungsional umum. Sehingga dapat disimpulkan responden yang ada sudah tersebar merata untuk seluruh jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

5.3. **Gambaran Faktor Komunikasi dan Sumber Daya**

Pada sub bab 5.3 ini akan disajikan bagaimana gambaran faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bidang pendaftaran tanah berdasarkan persepsi dari responden yang dituangkan dalam kuesioner yang telah dibagikan dan diterima kembali oleh peneliti. Faktor yang dimaksud terdiri dari variabel komunikasi dan sumberdaya. Selanjutnya variabel komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) komunikasi level I yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan); (2) komunikasi level II yaitu komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan kelompok sasaran dan (3) komunikasi level III yaitu komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait. Sehingga ada 4 (empat) variabel yang akan dipersepsikan oleh responden yang selanjutnya akan disajikan oleh peneliti sebagai gambaran faktor yang mempengaruhi implementasi renstra.

5.3.1 **Komunikasi Level I (Komunikasi antara atasan dan bawahan)**

Variabel komunikasi level I diukur dengan 4 (empat) item pertanyaan yaitu : (1) Keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan; (2) Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara atasan dengan bawahan; (3) Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan serta (4) Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan.

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.13

Tabel 5.13 **Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Komunikasi Level I**

No	Item	Jawaban Responden					Rata - Rata Item	
		STS	TS	CS	S	SS		
X1.1	Keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan	Freq	0	6	21	27	34	4.01
		%	0	6.8	23.9	30.7	38.6	
X1.2	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah pegawai yang tersosialisasikan) antara atasan dengan bawahan	Freq	0	4	9	41	34	4.19
		%	0	4.5	10.2	46.6	38.6	
X1.3	Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan	Freq	0	7	17	27	37	4.07
		%	0	8	19.3	30.7	42	
X1.4	Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan	Freq	0	0	3	31	54	4.58
		%	0	0	3.4	35.2	61.4	
		Rata- Rata Variabel					4.21	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel komunikasi level I selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

(1) Jawaban responden untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 6 orang (6.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik. Persentase ini menempati urutan terendah dari total keseluruhan prosentase jawaban untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi. Karena hanya sebagian kecil saja responden yang tidak setuju, kemungkinan hal ini disebabkan karena responden yang bersangkutan tidak mempunyai cukup perangkat berkomunikasi atau tidak aktif dalam berkomunikasi karena berbagai alasan, sehingga

merasa keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan tidak terpenuhi dengan baik

- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 21 orang (23.9%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik. Persentase ini menempati urutan tertinggi dari total keseluruhan prosentase jawaban untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item keragaman dan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik (rata-rata 4.01). Hal ini berarti secara keseluruhan responden secara aktif melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan dengan berbagai ragam saluran yang ada dalam implementasi renstra
- (2) Jawaban responden untuk item Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dengan bawahan terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 4 orang (4.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 9 orang (10.2%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 41 orang (46.6%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik..
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara atasan dan bawahan telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 4.19). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai jumlah pelaksanaan sosialisasi dan jumlah pegawai yang tersosialisasikan telah memadahi
- (3) Jawaban responden untuk item Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara atasan dengan bawahan terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 7 orang (8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 17 orang (19.3%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik..
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 37 orang (42%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara atasan dengan bawahan telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 4.07). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara atasan dan bawahan adalah konsisten dari waktu ke waktu.
- (4) Jawaban responden untuk item Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan terdiri dari :
- a. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 3 orang (3.4%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra

- Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban S (skor 4) sebanyak 31 orang (35.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - c. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 54 orang (61.4%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah terpenuhi dengan baik.
 - d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara atasan dengan bawahan telah dilaksanakan dengan sangat baik. (rata-rata 4.58). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara atasan dan bawahan sangat jelas dipahami dan penggunaan bahasa juga tidak menjadi kendala sama sekali dalam komunikasi.
- (5) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi level I dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik dan menuju ke arah yang sangat baik (rata-rata 4.21).

Pola komunikasi level I di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada prakteknya dilaksanakan setiap hari dan intensif. Salah satu bentuk dari komunikasi tersebut berupa apel pagi yang dilaksanakan setiap hari. Apel pagi diisi dengan motivasi, arahan pelaksanaan tugas, perkembangan kebijakan dan peraturan serta evaluasi terhadap kinerja organisasi. Apa yang telah

dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sesuai dengan teori dan pendapat *Katz dan Kahn* (1966) yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan ke bawahan yaitu berupa :

- (1) Perintah mengenai apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya.
- (2) Penjelasan atau penjabaran bagaimana satu tugas berkaitan dengan tugas lainnya.
- (3) Informasi mengenai peraturan, regulasi, kebijakan, dan keuntungan.
- (4) Informasi mengenai seberapa efektif kinerja seseorang
- (5) Informasi yang bertujuan untuk memotivasi para karyawan dengan memberikan kesan tentang misi organisasi dan secara khusus bagaimana mereka terhubung dengan misi organisasi

Gambar 5.7 Bentuk Komunikasi level I berupa Apel Pagi



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

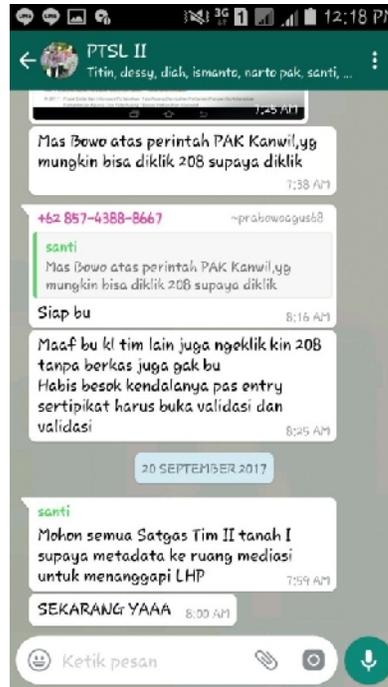
Bentuk komunikasi lainya berupa penyampaian informasi dalam bentuk tertulis berupa arahan dan disposisi serta melalui saluran elektronik seperti grup *whatsapp*. Di dalam saluran elektronik tersebut komunikasi juga terjadi antara bawahan yang melaporkan perkembangan pekerjaan dan hambatan hambatan yang ada dari bawahan ke atasanya. Bawahan juga membuat laporan tertulis secara berkala terhadap perkembangan pekerjaan dan juga untuk menjawab apa

yang menjadi arahan dalam disposisi atasan. Komunikasi dari bawahan ke atasan ini menjadi penting karena alasan sebagaimana dikemukakan *Pace* dan *Faules* (2001) sebagai berikut :

- (1) Aliran informasi ke atas memberi informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan – kegiatan lainnya (*Sharma, 1997*)
- (2) Komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia kapan bawahan mereka siap menerima informasi dan seberapa baik bawahan menerima apa yang dikatakan kepada mereka (*Planty dan Machaver, 1953*)
- (3) Memungkinkan dan bahkan mendorong omelan dan keluh kesah muncul kepermukaan sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu mereka, yang paling dekat dengan operasi yang sebenarnya (*Conboy, 1976*)
- (4) Komunikasi ke atas mengizinkan penyelia untuk menentukan apakah bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi ke bawah (*Planty dan Machaver, 1952*)
- (5) Membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaan dan organisasinya (*Harriman, 1974*)

Berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan pada prakteknya keragaman, kelancaran, intensitas sosialisasi dalam komunikasi level I di Kantor Pertanahan Kabupaten telah terpenuhi dengan baik sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh para responden.

Gambar 5.8 Bentuk Komunikasi level I via Saluran Elektronik



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

5.3.2 Komunikasi Level II (Komunikasi antara Kantor Pertanahan dan Kelompok sasaran)

Variabel komunikasi level II diukur dengan 4 (empat) item pertanyaan yaitu : (1) Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran; (2) Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah masyarakat yang tersosialisasikan); (3) Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran serta (4) Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran .

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.14

Tabel 5.14 **Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Komunikasi Level II**

No	Item	Jawaban Responden					Rata - Rata Item	
		STS	TS	CS	S	SS		
X2.1	Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	Freq	0	3	26	58	1	3.65
		%	0	3.4	29.5	65.9	1.1	
X2.2	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah masyarakat yang tersosialisasikan) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	Freq	0	6	34	46	2	3.5
		%	0	6.8	38.6	52.3	2.3	
X2.3	Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	Freq	0	13	36	38	1	3.31
		%	0	14.8	40.9	43.2	1.1	
X2.4	Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran	Freq	0	12	44	30	2	3.25
		%	0	13.6	50	34.1	2.3	
		Rata- Rata Variabel					3.43	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel komunikasi level II selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

(1) Jawaban responden untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra

keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.

- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 58 orang (65.9%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mendekati baik (rata-rata 3.65). Hal ini berarti secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam sosialisasi telah menggunakan berbagai saluran komunikasi dan dilaksanakan secara lancar tidak ada kendala yang cukup berarti.

(2) Jawaban responden untuk item Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi kantor pertanahan dengan kelompok sasaran terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 6 orang (6.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.

- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 46 orang (52.3%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik..
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 2 orang (2.3%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan cukup baik dan menuju ke arah yang baik. (rata-rata 3.5). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai jumlah pelaksanaan sosialisasi dan jumlah kelompok sasaran yang tersosialisasikan telah dirasa cukup oleh para responden
- (3) Jawaban responden untuk item Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 13 orang (14.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra

ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.

- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 36 orang (40.9%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 38 orang (43.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik..
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan cukup. (rata-rata 3.31). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran cukup konsisten dari waktu ke waktu.
- (4) Jawaban responden untuk item Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 12 orang (13.6 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian

informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.

- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 44 orang (50%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 30 orang (34.1%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 2 orang (2.3%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah terpenuhi dengan sangat baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran telah dilaksanakan dengan cukup. (rata-rata 3.25). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran ada yang jelas dipahami dan ada yang tidak jelas dipahami oleh kelompok sasaran penggunaan bahasa juga terkadang menjadi kendala dalam komunikasi. Hal ini bisa dikarenakan karena dalam kelompok sasaran, pendidikan,

pengalaman, pengetahuan akan sangat menentukan dalam menangkap kejelasan informasi dan penggunaan bahasa yang disampaikan

- (5) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi level II dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan cukup, namun belum belum menuju ke arah yang baik (rata-rata 3.43).

Komunikasi level II ini menurut teori termasuk dalam kategori komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan, 2005). Berbagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- (1) Memberikan informasi kepada publik.
- (2) Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan.
- (3) Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab.
- (4) Memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara.

Pelaksanaan komunikasi level II ini yang utama dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada warga masyarakat terkena dampak program.

Gambar 5.9 Bentuk Komunikasi level II Berupa Sosialisasi



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

Kegiatan yang lain adalah melalui pemasangan poster, baliho dan menyebarkan pamflet di kelurahan dan di tempat – tempat strategis. Komunikasi pemerintahan tidak luput dari berbagai hambatan. Menurut *Simon, Smithburg* dan *Thomson* (1997) dalam bukunya yaitu *Handbook of Administrative Communication* hambatan - hambatan komunikasi pemerintahan yang biasanya terjadi yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh penulis hambatan dalam komunikasi pemerintahan seperti yang diutarakan *Simon, Smithburg,* dan *Thomson* dalam *Handbook of Administrative Communication* tidak cukup mengganggu dalam pelaksanaan komunikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Namun dari penilaian responden yang menyatakan cukup (rata-rata 3.43) mengindikasikan bahwa pelaksanaan komunikasi bisa dikatakan tidak benar benar bebas dari hambatan – hambatan yang disebutkan tersebut.

5.3.3 Komunikasi Level III (Komunikasi antara Kantor Pertanahan dan Instansi terkait)

Variabel komunikasi level III diukur dengan 4 (empat) item pertanyaan yaitu : (1) Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait; (2) Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah instansi yang tersosialisasikan); (3) Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait serta (4) Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait.

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.15

Tabel 5.15 **Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Komunikasi Level III**

No	Item	Jawaban Responden					Rata - Rata Item	
		STS	TS	CS	S	SS		
X3.1	Keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	Freq	0	5	26	37	20	3.82
		%	0	5.7	29.5	42	22.7	
X3.2	Intensitas sosialisasi (jumlah pelaksanaan sosialisasi), tingkat pemerataan sosialisasi (jumlah instansi yang tersosialisasikan) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	Freq	0	3	18	48	19	3.94
		%	0	3.4	20.5	54.5	21.6	
X3.3	Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	Freq	0	3	19	60	6	3.78
		%	0	3.4	21.6	68.2	6.8	
X3.4	Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait	Freq	0	2	27	40	19	3.86
		%	0	2.3	30.7	45.5	21.6	
Rata- Rata Variabel							3.85	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel komunikasi level III selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

(1) Jawaban responden untuk item keragaman dan kelancaran komunikasi terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 5 orang (5.7 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 37 orang (42%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 20 orang (22.7%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item keragaman dan kelancaran komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik (rata-rata 3.82). Hal ini berarti secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh kantor

pertanahan dalam komunikasi dan sosialisasi dengan instansi terkait telah dilaksanakan secara lancar tidak ada kendala yang cukup berarti.

(2) Jawaban responden untuk item Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi kantor pertanahan dengan instansi terkait terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 18 orang (20.5%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 48 orang (54.5%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Intensitas sosialisasi dan tingkat pemerataan sosialisasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.94). Hal ini berarti secara keseluruhan responden

menilai jumlah pelaksanaan sosialisasi dan jumlah instansi yang tersosialisasikan telah dirasa memenuhi oleh para responden

- (3) Jawaban responden untuk item Ketetapan informasi (konsistennya informasi) antara kantor pertanahan dengan instansi terkait terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 60 orang (68.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik..
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 6 orang (6.8%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra ketetapan informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.78). Hal ini berarti secara keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan kantor pertanahan kepada instansi terkait adalah konsisten dari waktu ke waktu.

- (4) Jawaban responden untuk item Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 2 orang (2.3 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 40 orang (45.5%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan baik.
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah terpenuhi dengan sangat baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Kejelasan informasi dan penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.86). Hal ini berarti secara

keseluruhan responden menilai informasi yang disampaikan antara kantor pertanahan dengan instansi terkait jelas dipahami dan penggunaan bahasa juga tidak menjadi kendala dalam komunikasi. Hal ini dikarenakan karena dalam berkomunikasi dengan instansi terkait menggunakan bahasa yang formal, bahasa standar yang biasa dipakai dalam birokrasi.

- (5) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel komunikasi level III dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan lebih dari sekedar cukup dan hampir baik (rata-rata 3.85).

Komunikasi level III yaitu komunikasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan instansi terkait meliputi Pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Ikatan Surveyor Indonesia, Surveyor Berlisensi, Badan Informasi Geospasial dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dengan instansi terkait. Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka, berkirim surat serta penyebaran pamflet.

Gambar 5.10 Bentuk Komunikasi level III Berupa Sosialisasi



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2017

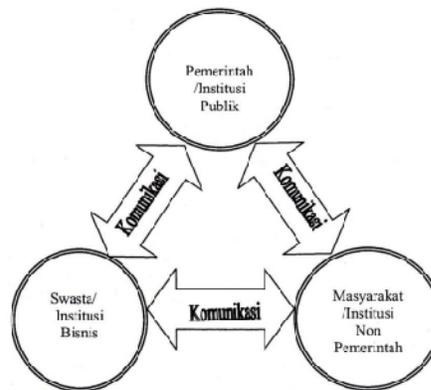
Komunikasi juga dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi seperti *whatsapp* atau telepon, hal ini dilakukan sebagai komunikasi tambahan untuk memperjelas dan memperlancar komunikasi. Kantor Pertanahan juga melakukan komunikasi dengan instansi terkait melalui website pertanahan. Namun komunikasi yang utama adalah melalui surat menyurat karena telah ada aturan, norma, dan prosedur untuk mengatur masing – masing organisasi. Komunikasi level III yang dilakukan menggunakan model birokrasi karena pihak pihak yang terkait dalam komunikasi level III adalah organisasi pemerintah yang memenuhi 8 (delapan) karakteristik birokrasi menurut teori birokrasi *Max Weber*. *Max Weber* (1948), mengungkapkan bahwa model birokrasi sering kali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Dalam model teori birokrasi *Max Weber*, ditekankan mengenai pentingnya peraturan. Menurut *Weber* peraturan seharusnya diterapkan secara rasional dan harusnya ada peraturan untuk segala hal dalam organisasi. Tentunya, peraturan-peraturan itu tertulis. Dengan demikian, organisasi akan mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Para responden menilai bahwa pelaksanaan komunikasi level III ini telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mendekati baik, sehingga menurut penulis masing - masing organisasi yang melaksanakan komunikasi ini telah melaksanakan model birokrasi organisasi dengan baik sehingga tercapai komunikasi organisasi yang efektif.

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut *Hogwood dan Gunn* (1978) yang dikutip oleh *Wahab* (2004) bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi

yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Secara keseluruhan untuk variabel komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mendapatkan persepsi lebih dari cukup dan menuju ke penilaian yang baik. Hal ini menandakan bahwa model komunikasi yang dilakukan telah sesuai dan memenuhi salah satu teori administrasi publik yaitu *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Gambar 5.11 Model Komunikasi dalam perspektif Good Governance



Sumber : Ulber Silalahi, 2004

5.3.4 Sumber Daya

Variabel sumber daya diukur dengan 8 (delapan) item pertanyaan yaitu :
 (1) Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra ; (2) Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam implementasi renstra; (3) Tahapan-tahapan dalam

proses pensertipikatan tanah (4) Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra; (5) Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana; (6) Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana; (7) Jumlah anggaran dalam implementasi renstra serta (8) Waktu yang tersedia

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.16

Tabel 5.16 Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Sumber Daya

No	Item	Jawaban Responden					Rata - Rata Item	
		STS	TS	CS	S	SS		
Z.1	Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra	Freq	3	15	32	30	8	3.28
		%	3.4	17	36.4	34.1	9.1	
Z.2	Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam implementasi renstra	Freq	0	4	23	46	15	3.82
		%	0	4.5	26.1	52.3	17	
Z.3	Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah	Freq	0	5	25	43	15	3.77
		%	0	5.7	28.4	48.9	17	
Z.4	Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra	Freq	0	6	25	49	8	3.67
		%	0	6.8	28.4	55.7	9.1	
Z.5	Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana	Freq	0	7	38	40	3	3.44
		%	0	8	43.2	45.5	3.4	
Z.6	Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana	Freq	8	20	38	20	2	2.86
		%	9.1	22.7	43.2	22.7	2.3	
Z.7	Jumlah anggaran dalam implementasi renstra	Freq	14	23	29	22	0	2.67
		%	15.9	26.1	33	25	0	
Z.8	Waktu yang tersedia	Freq	18	26	24	19	1	2.53
		%	20.5	29.5	27.3	21.6	1.1	
		Rata- Rata Variabel					3.26	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel sumber daya selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana renstra terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 3 orang (3.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 15 orang (17 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 32 orang (36.4%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 30 orang (34.1%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 8 orang (9.1%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat,

pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana telah terpenuhi dengan baik.

- f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana dalam implementasi renstra telah tersedia dengan penilaian cukup (rata-rata 3.28). Hal ini berarti secara keseluruhan apa yang dimiliki oleh kantor pertanahan dalam hal Jumlah, tingkat pengetahuan, keterampilan penggunaan alat, pengalaman dan tingkat pendidikan para pelaksana cukup untuk melaksanakan apa yang telah ditargetkan dalam renstra. Namun ada sekitar 20,4 % yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju, hal ini kemungkinan terkait dengan jumlah para pelaksana yang kurang, karena dari data yang ada tingkat pengetahuan, keterampilan dan pendidikan para pelaksana telah terverifikasi dengan baik.

(2) Jawaban responden untuk item Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan dalam implementasi renstra terdiri dari :

- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 4 orang (4.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 23 orang (26.1%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik

- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 46 orang (52.3%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik..
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 15 orang (17%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Tingkat kepatuhan petugas terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.82). Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari para pelaksana bahwa ada konsekuensi hukum dari penerbitan sertipikat serta pengalaman dari adanya kasus kasus hukum khususnya terkait dengan produk rencana strategis bidang pendaftaran tanah (sertipikat).
- (3) Jawaban responden untuk item Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 5 orang (5.7 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 25 orang (28.4%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 43 orang (48.9%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-

tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan baik.

- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 15 orang (17 %) yang berarti bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah terpenuhi dengan sangat baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Tahapan-tahapan dalam proses pensertipikatan tanah telah dilaksanakan dengan baik (rata-rata 3.77). Item ini terkait dengan kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga benar adanya bahwa hasil penilaian item tahapan dalam proses sertifikasi ini berbanding lurus dengan item kepatuhan petugas terhadap peraturan.
- (4) Jawaban responden untuk item Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra terkait terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 6 orang (6.8 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 25 orang (28.4 %) yang berarti bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 49 orang (55.7%) yang berarti bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik..

- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 8 orang (9.1%) yang berarti bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Informasi yang berhubungan dengan cara implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.67).
- (5) Jawaban responden untuk item Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana terdiri dari :
- a. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 7 orang (8%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 38 orang (43.2%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 40 orang (45.5%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 3 orang (3.4%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana telah terpenuhi dengan baik.

- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item Koordinasi dan pembagian kewenangan antar pelaksana dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan penilaian cukup (rata-rata 3.44).

(7) Jawaban responden untuk item Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana dalam implementasi renstra terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang (9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 20 orang (22.7 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 38 orang (43.2%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 20 orang (22.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik..
- e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 2 orang (2,3%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju dalam implementasi renstra Jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan baik.

- f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra jumlah dan kondisi peralatan, sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik / kurang (rata-rata 2.86). Penilaian ini berbanding lurus dengan data kondisi dan jumlah peralatan yang ada di kantor pertanahan. (lampiran data kondisi peralatan sarana dan prasarana). Hal ini ditambah tidak adanya penambahan jumlah alat dalam beberapa tahun terakhir)

(8) Jawaban responden untuk item Jumlah anggaran terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 14 orang (15.9 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 23 orang (26.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 29 orang (33%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 22 orang (25%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Jumlah anggaran tidak tersedia dengan baik / kurang. (rata-rata 2.67). Fakta dilapangan menggambarkan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk para skateholder khususnya bagi pegawai desa / kelurahan yang terkait langsung dengan implementasi. Perkembangan

terakhir ada beberapa desa / kelurahan yang menganggarkan dana tersebut dari dana desa.

(9) Jawaban responden untuk item Waktu yang tersedia terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 18 orang (20.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Jumlah waktu tersedia dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 66 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 24 orang (27.3 %) yang berarti bahwa Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik.
- e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa Waktu yang tersedia telah terpenuhi dengan baik.
- f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Waktu yang tersedia dalam implementasi renstra dinilai kurang. (rata-rata 2.53). data yang ada di kantor menunjukkan bahwa akhir juli 2017 dari 5900 bidang tanah yang ditargetkan baru ada realisasi 3350, sedangkan untuk tahap 2 baru mulai sosialisasi dengan target 20.000 bidang tanah.

(10) Secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel sumber daya dalam implementasi renstra hanya tersedia dengan cukup (rata-rata 3.26), namun ada beberapa item sumber daya yang dipersepsikan tidak baik atau kurang oleh responden yaitu jumlah, kondisi peralatan sarana dan pra sarana (2,86),

jumlah anggaran (2,67) dan waktu yang tersedia (2,53). Walaupun secara keseluruhan item sumber daya tersedia dengan penilaian cukup, namun ada 3 (tiga) item dengan kondisi yang kurang, sehingga akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi renstra

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu diantaranya sejumlah 8 (delapan) seperti yang penulis sebutkan dalam tabel 5.16 di atas.

Berdasarkan persepsi responden ada 3 (tiga) item variabel sumberdaya yang dinilai kurang yaitu : jumlah, kondisi peralatan sarana dan pra sarana , jumlah anggaran dan waktu yang tersedia . Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Bagaimana keterkaitan kondisi peralatan sarana dan pra sarana dengan keberhasilan implementasi seperti yang dijelaskan oleh Edward III sebagai berikut: *“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings equipment, supplies and even green space implementation won’t succeed”*. Anggaran juga menjadi faktor yang krusial dalam keberhasilan

suatu kebijakan. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa ada beberapa fungsi anggaran pada sektor publik yaitu :

- (1) Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan antara lain untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan, merencanakan program kebijakan itu sendiri, serta mengalokasikannya serta menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Tanpa adanya perencanaan yang baik tidak akan mungkin suatu program kebijakan akan diimplementasikan dengan baik pula. Suhandak (2007) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan harus dilakukan perencanaan yang baik terlebih dahulu, karena kekhawatiran akan ketersediaan dana yang ada kurang cukup dalam proses pelaksanaan karena adanya keterbatasan dan ketersediaan dalam proses implementasi
- (2) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sehingga anggaran yang tidak cukup akan membuat koordinasi dan komunikasi antar pelaksana dan *stakeholder* terkait menjadi tidak efektif
- (3) Anggaran sebagai alat motivasi, agar para pelaksana dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam memenuhi target dan tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Van Metter dan Van Horn keberhasilan proses implementasi kebijakan dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn, 1975 dalam Agustino, 2006). Oleh karena itu waktu menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hogwood dan Gunn (1986) dalam Abdul Wahab (1991), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu diantaranya tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan

dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006). Namun kualitas atau ciri para aktor ini mendapat penilaian yang cukup baik dari para responden

5.3.5 Implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Dalam Bidang Pendaftaran Tanah

Variabel implementasi renstra diukur dengan 9 (sembilan) item pertanyaan yaitu : (1) Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan ; (2) Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran; (3) Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (4) Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan; (5) Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan;(6) Jumlah Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran;(7) Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun ; (8) Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan; serta (9) Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal

Rekapitulasi hasil kuesioner yang telah dibagikan dan yang diterima kembali oleh peneliti disajikan dalam tabel 5.17

Tabel 5.17 Distribusi Frekuensi Responden terhadap Variabel Implementasi Renstra

No	Item	Jawaban Responden					Rata - Rata Item	
		STS	TS	CS	S	SS		
Y.1	Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan sesuai target	Freq	2	23	37	0	26	3.28
		%	2.3	26.1	42	0	29.5	
Y.2	Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran sesuai target	Freq	9	38	32	9	0	2.47
		%	10.2	43.2	36.4	10.2	0	
Y.3	Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah	Freq	8	33	28	19	0	2.66
		%	9.1	37.5	31.8	21.6	0	
Y.4	Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan	Freq	1	0	27	34	26	3.95
		%	1.1	0	30.7	38.6	29.5	
Y.5	Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan	Freq	8	33	41	0	6	2.58
		%	9.1	37.5	46.6	0	6.8	
Y.6	Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran sesuai target	Freq	7	45	0	36	0	2.74
		%	8	51.1	0	40.9	0	
Y.7	Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun	Freq	21	34	27	5	1	2.22
		%	23.9	38.6	30.7	5.7	1.1	
Y.8	Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan	Freq	17	45	0	26	0	2.4
		%	19.3	51.1	0	29.5	0	
Y.9	Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal	Freq	23	33	27	5	0	2.16
		%	26.1	37.5	30.7	5.7	0	
		Rata- Rata Variabel					2.72	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Hasil persepsi responden terhadap variabel implementasi renstra selanjutnya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini :

- (1) Jawaban responden untuk item Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan terdiri dari :
 - a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 2 orang (2.3 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra

Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.

- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 23 orang (26.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 37 orang (42%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa item peningkatan jumlah cakupan bidang tanah yang disertipikatkan dalam implementasi renstra telah dilaksanakan dengan penilaian cukup baik (rata-rata 3.28).

(2) Jawaban responden untuk item Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran dalam implementasi renstra terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 9 orang (10.2 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 38 orang (43.2 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.

- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 32 orang (36.4 %) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik
 - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 9 orang (10.2%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik..
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas peta dasar pendaftaran belum dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 2.47).
- (3) Jawaban responden untuk item Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang 9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik.
 - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 33 orang (37.5 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik.
 - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 28 orang (31.8%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik
 - d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 19 orang (21.6%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan

pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah terpenuhi dengan baik.

- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah belum dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 2.66). Hal ini ditandai dengan masih banyaknya keluhan dari masyarakat serta banyaknya tunggakan sertipikasi tanah di akhir tahun

(4) Jawaban responden untuk item Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan dalam implementasi renstra terkait terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang (9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7 %) yang berarti bahwa Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 34 orang (38.6%) yang berarti bahwa Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah terpenuhi dengan baik..
- d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah terpenuhi dengan sangat baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai Peningkatan kecepatan legalisasi aset khususnya di pedesaan implementasi renstra telah dilaksanakan dengan baik. (rata-rata 3.95).

- (5) Jawaban responden untuk Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan terdiri dari :
- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 8 orang (9.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik
 - b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 33 orang (37.5%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik.
 - c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 41 orang (46.6%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik.
 - d. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 6 orang (6.8%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan telah terpenuhi dengan baik.
 - e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Peningkatan kualitas pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan dalam implementasi renstra belum dilaksanakan dengan baik / dibawah rata-rata (rata-rata 2.58).
- (7) Jawaban responden untuk item Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran dalam implementasi renstra terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 7 orang (8 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 45 orang (51.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 36 orang (40.9%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran telah terpenuhi dengan baik..
- d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Peningkatan luas cakupan peta dasar pendaftaran tidak terlaksana dengan baik / kurang. (rata-rata 2.74).

(8) Jawaban responden untuk item Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 21 orang (23.9 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 34 orang (38.6 %) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik.

- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa responden tersebut cukup setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 5 orang (5.7%) yang berarti bahwa responden tersebut setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik.
- e. Jawaban SS (skor 5) sebanyak 1 orang (1.1%) yang berarti bahwa responden tersebut sangat setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun telah terpenuhi dengan baik.
- f. Secara keseluruhan responden menilai bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian jumlah tunggakan proses sertipikasi tanah di akhir tahun tidak tersedia dengan baik / kurang. (rata-rata 2.22). Hasil penilaian responden sesuai dengan data tunggakan pekerjaan sertipikasi tanah yang ada di kantor pertanahan kabupaten Bantul

(9) Jawaban responden untuk item Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 17 orang (19.3 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan tersedia dengan baik
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 45 orang (51.51%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra

Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan telah terpenuhi dengan baik.

- c. Jawaban S (skor 4) sebanyak 26 orang (29.5%) yang berarti bahwa Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan telah terpenuhi dengan baik.
- d. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Penyelesaian keluhan masyarakat dan kasus kasus pertanahan dalam implementasi renstra dinilai kurang. (rata-rata 2.4).

(10) Jawaban responden untuk item Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal terdiri dari :

- a. Jawaban STS (skor 1) sebanyak 23 orang (26.1 %) yang berarti bahwa responden tersebut sangat tidak setuju bahwa dalam implementasi renstra Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal
- b. Jawaban TS (skor 2) sebanyak 33 orang (37.5%) yang berarti bahwa responden tersebut tidak setuju bahwa Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal telah terpenuhi dengan baik.
- c. Jawaban CS (skor 3) sebanyak 27 orang (30.7%) yang berarti bahwa Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal telah terpenuhi dengan baik
- d. Jawaban S (skor 4) sebanyak 5 orang (5.7%) yang berarti bahwa Implementasi renstra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal telah terpenuhi dengan baik.
- e. Secara keseluruhan responden menilai bahwa Implementasi renstra tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal. (rata-rata 2.16).

(11) Secara keseluruhan responden menilai bahwa implementasi renstra belum dilaksanakan dengan baik (rata-rata 2.72). Diantara 9 (sembilan) item yang dinilai ada 2 (dua) item dengan penilaian lebih dari rata-rata dan baik, yaitu terkait peningkatan jumlah cakupan bidang tanah tersertipikatkan (3.28) dan peningkatan kecepatan legalisasi aset di pedesaan (3.95). Sedangkan sisanya 7 (tujuh) item kesemuanya dibawah rata – rata. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan juga bahwa menurut para responden secara kuantitas pelaksanaan renstra pendaftaran tanah sudah baik, namun secara kualitas masih dibawah rata – rata. Urutan penilaian terendah terletak pada item 9 (sembilan), yaitu implementasi renstra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal (pendaftaran satu desa lengkap) (2,16). Secara empiris ini dimungkinkan karena dengan kondisi waktu, peralatan, anggaran dan sumber daya yang kurang maka kantor pertanahan membuat kebijakan agar memudahkan dalam pelaksanaan dan target besar yang dicanangkan dapat tercapai.

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003) bahwa kuantitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987) mengatakan bahwa kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaannya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam

menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Kadir (2001) Menyatakan bahwa kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas). Mangkunegara (2009) membedakan kualitas dan kuantitas kerja sebagai berikut. Kualitas kerja adalah ukuran seberapa baik seorang karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Sedangkan kuantitas kerja adalah ukuran seberapa lama karyawan dapat bekerja dalam satu hari.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas sekiranya dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kuantitas kerja lebih mudah untuk dipenuhi dari pada kualitas kerja. Kuantitas kerja jelas ukurannya, sedangkan kualitas kerja masih ada ruang untuk diperdebatkan. Sehingga secara umum hasil persepsi para responden terhadap implementasi rensta yang memberikan penilaian baik untuk kuantitas serta kurang baik terhadap kualitas bisa diterima.

Item implementasi penyelesaian tunggakan sertipikasi tanah di akhir tahun dinilai kurang baik oleh para responden. Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menunjukkan pada akhir tahun 2015 terdapat tunggakan pembuatan sertipikat pertama kali sebanyak 266 berkas dan pada akhir tahun 2016 sebanyak 294 berkas. Sedangkan untuk item peningkatan pelayanan masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah data yang ada menunjukkan ada tunggakan pada akhir tahun 2015 sebanyak 32 berkas dan pada akhir tahun 2016 sebanyak 251 berkas. Kemudian terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kecepatan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah juga tidak tercapai dengan baik, seperti Larasita pada tahun 2015 ketercapaian 10 % dan pada tahun 2016 ketercapaian 24,4 %. Adapun dari sisi penyelesaian kasus pertanahan, data yang ada di akhir tahun 2016 khusus pelayanan perkara hanya tercapai 33,33 %. Namun secara kuantitas data yang ada menunjukkan bahwa implementasi renstra dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa kendala mengapa secara kualitas hasil implementasi renstra kurang menggembirakan menurut persepsi responden. Diantaranya yaitu :

- 1) Bidang tanah terdaftar belum semuanya di plotting di peta dasar (flying parcel);
- 2) GeoKKP baru \pm 50%;
- 3) Arsip SU dan GU belum semuanya digitalisasi.

Sehingga saat ini jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul masih dan terus bekerja keras dalam mengatasi kendala tersebut. Penulis berpendapat apabila kendala tersebut dapat diselesaikan secara baik maka kualitas pekerjaan bukanlah hal yang sulit untuk dijangkau.

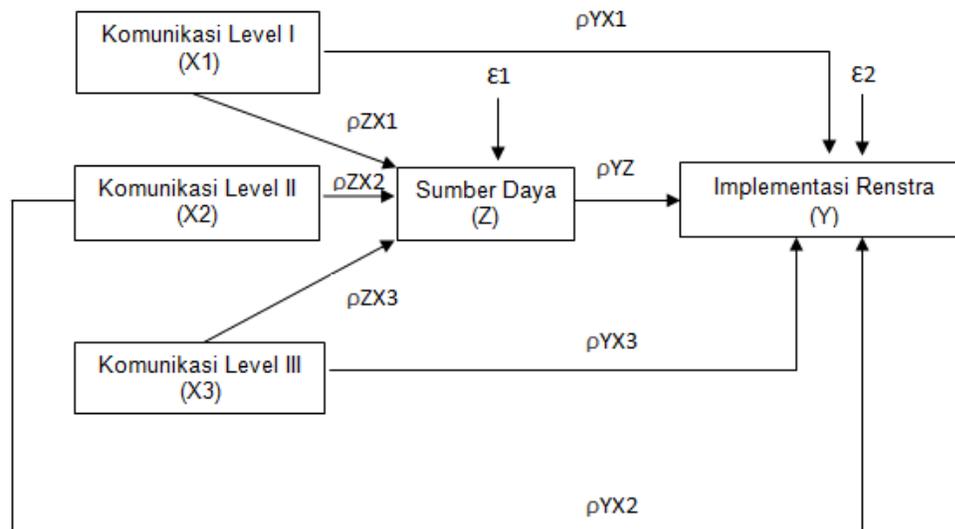
5.4 Hubungan antara Faktor Komunikasi dan Sumberdaya terhadap implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Dalam Bidang Pendaftaran Tanah

Untuk menjawab hipotesis penelitian seperti disebutkan dalam bab III di depan, maka penelitian ini menggunakan teknik analisa jalur yaitu suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel eksogennya mempengaruhi variabel endogen tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung Robert D. Rutherford (dalam Jonathan Sarwono, 2007). Pada analisis jalur terdapat diagram jalur yang

merupakan suatu diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel eksogen dan endogen. Untuk menunjukkan pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya diperlukan koefisien jalur yang merupakan koefisien regresi yang distandartkan atau disebut 'beta' yang disimbolkan dengan ρ . Sedangkan untuk menunjukkan besar pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya secara bersamaan disebut koefisien determinasi (R^2) yang dirumuskan (Riduwan dan Kuncoro, 2011).

Riduwan dan Kuncoro (2011) juga menyatakan bahwa secara sistematis analisis jalur mengikuti pola model struktural, sehingga langkah awal untuk mengerjakan analisis jalur yaitu merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur yang berdasarkan kajian teori tertentu. Berikut ini rumusan diagram jalur dan persamaan struktural berdasarkan hipotesis penelitian.

Gambar 5.12 Rumusan Diagram jalur model struktural



Sumber : Kajian teoritis Implementasi renstra Edward III

Sehingga berdasarkan diagram jalur di atas, dapat disusun persamaan struktural berikut ini :

$$Z = \rho ZX_1 + \rho ZX_2 + \rho ZX_3 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots \text{persamaan struktural 1}$$

$$Y = \rho YX_1 + \rho YX_2 + \rho YX_3 + \rho YZ + \varepsilon_2 \dots\dots\dots \text{persamaan struktural 2}$$

koefisien jalur diperoleh dari perhitungan regresi linier berganda. Karena ada 2 (dua) persamaan struktural maka dilakukan 2 (dua) kali perhitungan regresi linier berganda. Dari koefisien jalur yang diperoleh selanjutnya diuji secara keseluruhan dan parsial dengan hipotesisnya seperti dijelaskan pada bab III sebagai berikut:

H0 : variabel X1, X2, X3, Z tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel Y

H1 : variabel X1, X2, X3, Z berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel Y.

Persamaan struktural 1 menggambarkan pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Z. Koefisien jalur diperoleh dari analisis regresi linier sebagai mana dijelaskan dalam tabel 5.18.

Tabel 5.18 Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II dan Komunikasi level III dengan Sumber Daya

Variabel	r	R ²	.sig (p-value)	Koefisien	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p-value)
Komunikasi level I	0.342	0.117	0.015	0.94	0.268	0.011
Komunikasi level II					0.062	0.551
Komunikasi level III					0.214	0.043

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 5.18 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (p-value) variabel komunikasi level II sebesar 0.551, lebih besar dari 0.05 (level of significance) yang artinya variabel komunikasi level II tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel sumber daya (koefisien jalur variabel X2 tidak signifikan). Selanjutnya model persamaan struktural I diperbaiki dengan menghilangkan variabel komunikasi level II dan dilakukan perhitungan ulang regresi linier. Adapun hasil regresi ulang ditunjukkan pada tabel 5.19 berikut,

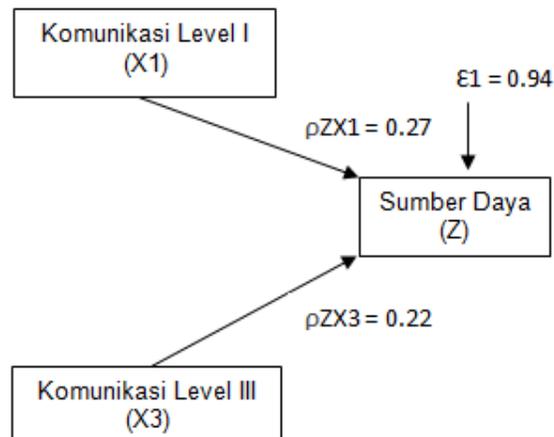
Tabel 5.19 **Analisis regresi antara Komunikasi level I dan Komunikasi level III dengan Sumber Daya setelah variabel komunikasi level II dihilangkan**

Variabel	r	R ²	.sig (p-value)	Koefisien e	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p-value)	Persamaan struktural 1
Komunikasi level I	0.337	0.113	0.006	0.94	0.27	0.01	$Z = 0.27 X_1 + 0.22 X_3 + 0.94$
Komunikasi level III					0.224	0.032	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Sehingga diagram jalur untuk persamaan 1 menjadi seperti dibawah ini :

Gambar 5.13 **Diagram jalur persamaan struktural 1**



Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil perhitungan statistik didapatkan bahwa komunikasi level II tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sumber daya. Berdasarkan pengamatan dari penulis dan informasi dari Kantor Pertanahan, bahwa pada awalnya komunikasi level I dilaksanakan dengan harapan warga masyarakat dan pihak desa untuk ikut aktif berpartisipasi dalam implemementasi renstra bidang pendaftaran tanah ini. Namun pada faktanya warga masyarakat kurang aktif turut serta dalam proses sertipikasi tanah. Sedangkan keaktifan dari pihak desa tidak menggambarkan hasil yang menggembirakan karena disamping sibuk dengan pembangunan desa masing masing (terkait dengan serapan dana desa), jumlah personil yang ada dirasa kurang. Tidak adanya anggaran di DIPA untuk menunjang keaktifan masyarakat dan pihak desa juga turut memberikan pengaruh mengapa komunikasi level I ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sumber daya.

Selanjutnya persamaan struktural 2 menggambarkan pengaruh variabel X1, X2, X3, Z terhadap variabel Y. Koefisien jalur diperoleh dari analisis regresi linier sebagai mana dijelaskan dalam tabel 5.20.

Tabel 5.20 Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II, Komunikasi level III dan Sumber Daya dengan Implementasi Renstra

Variabel	r	R ²	.sig (p-value)	Koefisien	Koefisien B (Koef Jalur)	.sig (p-value)
Komunikasi level I	0.471	0.222	0	0.88	0.248	0.016
Komunikasi level II					0.212	0.034
Komunikasi level III					0.088	0.384
Sumber Daya					0.236	0.025

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 5.20 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (p-value) variabel komunikasi level III sebesar 0.384, lebih besar dari 0.05 (level of significance) yang artinya variabel komunikasi level III tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel implementasi renstra (koefisien jalur variabel X3 tidak signifikan). Selanjutnya model persamaan struktural 2 diperbaiki dengan menghilangkan variabel komunikasi level III dan dilakukan perhitungan ulang regresi linier. Adapun hasil regresi ulang ditunjukkan pada tabel 5.21 berikut,

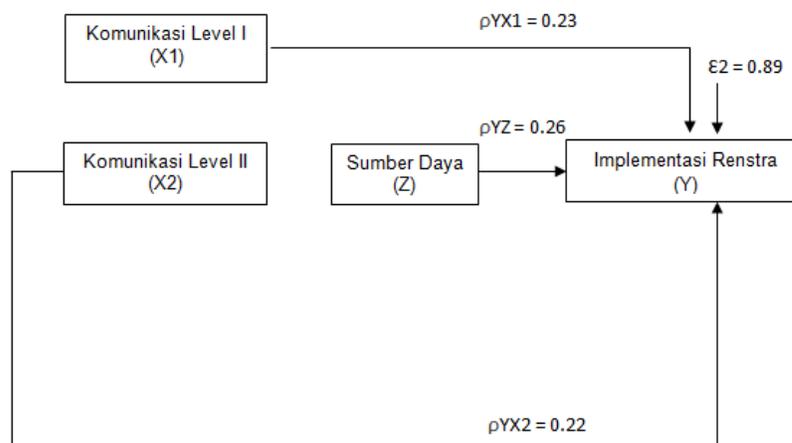
Tabel 5.21 Analisis regresi antara Komunikasi level I, Komunikasi Level II dan Sumber Daya dengan Implementasi Renstra setelah variabel komunikasi level III dihilangkan

Variabel	r	R ²	.sig (p-value)	Koefisien e	Koefisien B (Koeff Jalur)	.sig (p-value)	Persamaan Struktural 2
Komunikasi level I	0.463	0.215	0	0.89	0.235	0.021	Y= 0.23 X1 + 0.22 X2 + 0.26 Z + 0.89
Komunikasi level II					0.225	0.023	
Sumber Daya					0.256	0.013	

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Sehingga diagram jalur untuk persamaan 2 menjadi seperti dibawah ini :

Gambar 5.14 Diagram jalur persamaan struktural 2

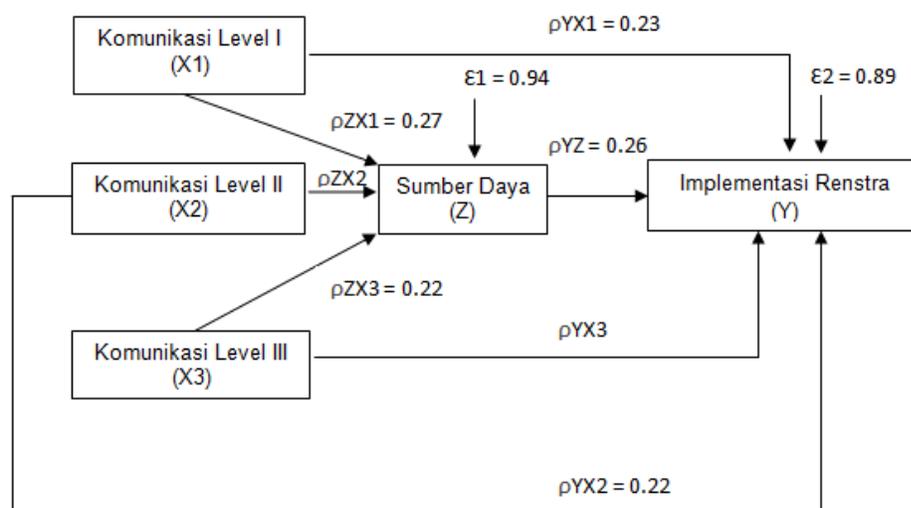


Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil perhitungan statistik didapatkan bahwa komunikasi level III tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap implementasi renstra. Namun komunikasi level III berpengaruh tidak langsung terhadap implementasi renstra yaitu melalui sumber daya. Hal ini bisa dijelaskan bahwa tujuan utama komunikasi kantor pertanahan kabupaten Bantul dengan Instansi terkait adalah bukan sekedar untuk tukar menukar informasi, namun juga data pendukung, penambahan anggaran dan perbantuan terkait jumlah staf pelaksana dan praktek praktek pelaksanaan kebijakan. Kesemuanya itu terkait dengan sumber daya sehingga menjadi wajar apabila komunikasi level III berpengaruh secara signifikan terhadap sumber daya, namun tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap implementasi renstra.

Berdasarkan koefisien jalur dan persamaan struktural diatas, maka konstruksi diagram jalur model struktural secara keseluruhan digambarkan dalam gambar 5.15 sebagaimana berikut.

Gambar 5.15 Diagram jalur model struktural



Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Berdasarkan gambar 5.15 ini selanjutnya dapat penulis sajikan pengaruh dari variabel X1, X2, X3, Z terhadap variabel Y, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung yang sekaligus untuk menguji hipotesis yang telah kita bangun.

Tabel 5.22 Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan pengaruh bersama variabel X1, X2, X3,Z terhadap Y

No	Pengaruh Variabel			Pengaruh			
				Langsung	Tidak Langsung (melalui Z)	Total	Pengaruh Bersama
1	X1	terhadap	Z	0.27	-	0.27	
2	X2	terhadap	Z	-	-	-	
3	X3	terhadap	Z	0.22	-	0.22	
4	X1	terhadap	Y	0.23	0.07	0.3	
5	X2	terhadap	Y	0.22	-	0.22	
6	X3	terhadap	Y	-	0.06	0.06	
7	Z	terhadap	Y	0.26		0.26	
8	X1,X2,X3	terhadap	Z	-	-	-	0.113
9	X1,X2,X3,Z	terhadap	Y	-	-	-	0.215
10	ε1			-	-	-	0.94
11	ε2			-	-	-	0.87

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Tabel 5.22 dapat menjawab hipotesa awal sebagaimana diuraikan sebagaimana berikut ini:

- (a) H_0 : Tidak ada pengaruh antara variabel komunikasi level I (X1), komunikasi level II (X2), komunikasi level III (X3) dan sumber daya (Z) secara parsial terhadap implementasi renstra (Y).

Dari tabel 5.22 nomor 4, 5, 6 dan 7 diketahui ada pengaruh variabel X1, X2, X3 dan Z terhadap variabel Y sebesar masing masing 30%,22 %,6% dan 26% sehingga H_0 ditolak. Artinya bahwa :

- H_1 : variabel komunikasi level I secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 30%,

H₂: variabel komunikasi level II secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 22 %

H₃: variabel komunikasi level III secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 6%

H₄: variabel sumber daya secara parsial berpengaruh pada proses implementasi renstra sebesar 22 %

(b) H₀: Tidak ada pengaruh antara variabel komunikasi level I (X1), komunikasi level II (X2), komunikasi level III (X3) dan sumber daya (Z) secara bersama-sama terhadap implementasi renstra (Y).

Dari tabel 5.22 nomor 9 diketahui ada pengaruh variabel X1, X2, X3 dan Z secara bersama sama terhadap variabel Y sebesar 21.5 %, sehingga H₀ ditolak. Artinya bahwa :

H₅: variabel komunikasi level I, komunikasi level II, komunikasi level III, dan variabel sumberdaya, secara simultan / bersama-sama mempengaruhi proses implementasi renstra sebesar 21.5 %

5.5. Model struktural analisa jalur

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda didapatkan 2 (dua) persamaan struktural yaitu:

$$Z = 0.27 X_1 + 0.22 X_3 + 0.94 \dots\dots\dots \text{persamaan struktural 1}$$

$$Y = 0.23 X_1 + 0.22 X_2 + 0.26 Z + 0.89 \dots\dots\dots \text{persamaan struktural 2}$$

Dan juga tabel 5.22 yaitu Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan pengaruh bersama variabel X1, X2, X3,Z terhadap Y. Sehingga penjelesaian untuk setiap persamaan struktural akan dikombinasikan dengan tabel 5.22. Penjelasan untuk persamaan struktural 1 adalah :

1. Konstanta sebesar 0.94 mengindikasikan bahwa apabila variabel komunikasi level I dan komunikasi level III bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan sumberdaya adalah sebesar 0.94
2. Koefisien variabel komunikasi level I sebesar 0.27 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level I berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel sumber daya. Semakin baik komunikasi antara atasan dan bawahan maka akan berpengaruh semakin baik juga terhadap sumber daya yang ada
3. Koefisien variabel komunikasi level III sebesar 0.22 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level III berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel sumber daya. Semakin baik komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait maka akan berpengaruh semakin baik juga terhadap sumber daya yang ada
4. Dalam persamaan struktural I tidak ada variabel komunikasi level II, artinya bahwa variabel komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel sumberdaya

Sedangkan penjelasan untuk persamaan struktural 2 adalah :

1. Konstanta sebesar 0.89 mengindikasikan bahwa apabila variabel komunikasi level I ,komunikasi level II dan sumberdaya bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan implementasi rensta adalah sebesar 0.89
2. Koefisien variabel komunikasi level I sebesar 0.23 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level I berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel implementasi rensta. Semakin baik komunikasi antara atasan dan bawahan maka akan berpengaruh semakin baik terhadap implementasi renstra

3. Koefisien variabel komunikasi level II sebesar 0.22 mengindikasikan bahwa variabel komunikasi level II berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel implementasi renstra. Semakin baik komunikasi antara kantor pertanahan dengan kelompok sasaran maka akan berpengaruh semakin baik juga terhadap implementasi renstra
4. Koefisien variabel sumberdaya sebesar 0.26 mengindikasikan bahwa variabel sumberdaya berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap variabel implementasi renstra. Semakin baik kondisi sumberdaya di kantor pertanahan Kabupaten Bantul maka akan semakin baik pula pelaksanaan renstra tersebut
5. Dalam persamaan struktural 2 tidak ada variabel komunikasi level III, artinya bahwa variabel komunikasi antara kantor pertanahan dengan instansi terkait tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel sumberdaya, namun dari tabel 5.22 diketahui variabel kantor pertanahan dengan instansi terkait berpengaruh secara tidak langsung terhadap implementasi renstra

5.6 Pengaruh Dominan

Pengaruh dominan dapat diketahui dari nilai koefisien jalur hasil regresi linier berganda. Tabel 5.22 di atas telah menjelaskan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan pengaruh bersama variabel X1, X2, X3, Z terhadap Y. Dari tabel tersebut dapat diketahui urutan pengaruh total variabel X1, X2, X3, Z terhadap Y sebagai berikut :

1. Pengaruh total variabel Komunikasi level I terhadap Implementasi renstra sebesar 30 %.

Variabel komunikasi level I memiliki pengaruh paling dominan. Hal ini berbanding lurus dengan persepsi dari para responden. Para responden

menilai komunikasi level I dilaksanakan dengan baik yaitu rata rata skor 4.21 dari skala 5 yang dinilai. Penilaian ini menempati peringkat tertinggi dibandingkan dengan penilaian terhadap variabel yang lain. Fakta di lapangan juga didapatkan bahwa pelaksanaan komunikasi level I telah dilaksanakan dengan baik. Keseluruhan item seperti keragaman dan kelancaran komunikasi, intensitas sosialisasi, ketetapan dan kejelasan informasi telah terpenuhi dengan baik. Bentuk bentuk komunikasi level I seperti apel pagi dan penggunaan sarana elektronik seperti penggunaan aplikasi *whatsapp group*, telah menterjemahkan teori dari Katz dan Kahn (1966) terkait jenis informasi yang biasa dilakukan dari atasan dan bawahan serta teori dari Pace dan Faules (2001) terkait pentingnya komunikasi dari bawahan ke atasan.

2. Pengaruh total variabel sumber daya terhadap Implementasi renstra sebesar 26 %.

Sumber daya memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi renstra. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Edward III (1980) dalam Widodo (2011) yang menyatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Khusus sumber daya manusia Agus Sunyoto (2008) memberi penjelasan bahwa manusia memegang peran yang sangat penting dalam

keberhasilan suatu usaha. Dalam organisasi usaha yang besar, modal yang besar, teknologi yang canggih, sumber daya alam yang berlimpah tidak mungkin dapat dieksploitasi tanpa sumber daya yang diperlukan, yang memadai, yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan.

3. Pengaruh total variabel Komunikasi level II terhadap Implementasi renstra sebesar 22 %.

Komunikasi level II memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi renstra. Keberhasilan kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran, keberhasilan dalam sosialisasi, bagaimana menarik simpati dari warga untuk memiliki kesadaran dalam mensertipikatkan tanahnya merupakan kunci dari keberhasilan implementasi renstra. Semakin baik komunikasi level II yang dilakukan semakin baik pula keberhasilan implementasi renstra. Disamping hambatan-hambatan Komunikasi level II berdasarkan teori dari *Simon, Smithburg* dan *Thompson* (1997) dalam bukunya yaitu *Hanbook of Administrative Communication* tidak terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, komunikasi level II ini mendapat penilaian lebih dari cukup dari para responden. Sehingga apabila variabel komunikasi level II ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap implementasi renstra, hal ini menurut pendapat penulis dapat diterima.

4. Pengaruh total variabel Komunikasi level III terhadap Implementasi renstra sebesar 6 %

Seperti pada penjelasan di muka bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut

Hogwood dan Gunn (1978) yang dikutip oleh Wahab (2004) bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan tabel 5.22 di atas maka dalam penelitian ini variabel komunikasi antara atasan dan bawahan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi implementasi renstra.

5.7 Perbandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang lain

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi level I dan komunikasi level III mempengaruhi situasi dan kondisi sumberdaya yang ada, dengan pengaruh masing – masing sebesar 27 % dan 22 %. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Beach (1975) yang menyatakan bagaimanapun organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan sumber daya secara parsial berpengaruh terhadap implementasi renstra. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian M Thoriq (2005) yang membenarkan dan membuktikan teori yang dikemukakan para ahli tentang pengaruh dari komunikasi, kemampuan pegawai dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan publik. Penelitian Widodo, A.S, (2002) menguatkan teori teori dari George C Edward

III(1980), David C Korten (1988),William N Dunn(1922) tentang hubungan antar sikap, sumberdaya dan pengawasan dengan implementasi kebijakan. Sehingga hasil penelitian widodo (khususnya terkait variabel sumberdaya) ini relevan dengan hasil penelitian penulis. Bahwa secara parsial sumber daya mempengaruhi implementasi renstra.

Harsono (2009) yang meneliti fenomena-fenomena Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional, melihat dari variabel-variabel implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Gejala-gejala dari dasar hukum dan kualitas pelayanan Komunikasi, fenomena komunikasi dan sumber daya) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Diantara hasil penelitiannya sesuai dengan hasil penelitian penulis yaitu bahwa fenomena komunikasi dan sumberdaya secara parsial mempengaruhi implementasi kebijakan. Sebagian hasil penelitian harsono ini juga sesuai dengan penelitian Purnomo (2013) dan Adnan (2013). Purnomo mengatakan secara parsial yang berpengaruh secara signifikan adalah variabel sumberdaya dan control. Variabel komunikasi, lingkungan dan isi rencana berpengaruh lemah atau tidak signifikan.Sedangkan Adnan mengatakan secara parsial yang memberikan pengaruh signifikan adalah variabel sumberdaya, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat. Yang berarti hasilnya selaras dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa faktor komunikasi (level I) menjadi faktor paling dominan yang berpengaruh dalam implementasi rensta. Hal ini tepat sesuai dengan penelitian Nurcholish, (2017), yang menyebutkan bahwa komunikasi memiliki peran yang dominan dalam implementasi renstra Pengelolaan Taman Nasional (Studi pada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Provinsi NTB). Hal ini menguatkan teori yang dikemukakan Edward III dalam agustino 2006 yang menyatakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Hasil penelitian juga menguatkan pendapat Edward II terkait sumberdaya dapat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Ahli kebijakan publik yang lain seperti Grindle menyatakan ada 9 variabel bebas yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, dikelompokkan menjadi 2 kategori besar yaitu isi kebijakan yang didalamnya ada sumberdaya dan konteks kebijakan. Serta Van meter dan Van Horn (dalam wibawa dkk, 1994) yang mengatakan ada 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, didalamnya ada variabel komunikasi dan sumber daya. Sehingga penelitian ini membuktikan dan menguatkan teori para ahli tersebut di atas, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik

5.8 Keterbatasan Penelitian

- (1) Penulis mengkhususkan sampel penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Sehingga keberhasilan implementasi hanya diukur dari persepsi pegawai Kantor Pertanahan dan data pendukung pada Kantor Pertanahan terkait
- (2) Tidak tertutup kemungkinan pada setiap variabel bebas dan variabel tengah yang telah digunakan ada indikator – indikator yang belum dimasukkan dan belum diteliti.
- (3) Hasil penelitian menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.87, artinya ada variabel - variabel lain diluar model penelitian, namun belum dimasukkan dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh cukup besar. Diantaranya variabel

Disposisi dan variabel Struktur Birokrasi atau bisa jadi variabel – variabel yang lain.